

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK DALAM PERSPEKTIF CHARLES O. JONES: SUATU TINJAUAN KONSEPTUAL

Fadhil¹ dan Bahagia²

¹Ilmu Politik, Prodi Politik, Universitas Syiah Kuala

²Ilmu Politik, Prodi Politik, Universitas Syiah Kuala

Alamat

* Corresponding Author: fadhil@usk.ac.id

ABSTRAK

ARTICLE INFO

Article history:

Received May 22, 2025

Revised May 26, 2023

Accepted May 26, 2023

Available online June 1, 2025

Kata Kunci:

Implementasi Kebijakan, Charles O. Jones, Kebijakan Publik, Indonesia

Keywords:

Policy Implementation, Charles O. Jones, Public Policy, Indonesia

Implementasi kebijakan publik merupakan tahap kritis dalam siklus kebijakan yang menentukan keberhasilan suatu program. Artikel ini bertujuan menganalisis proses implementasi berdasarkan kerangka Charles O. Jones yang mencakup tiga komponen utama: pengorganisasian, penafsiran, dan penerapan. Dengan pendekatan studi pustaka, kajian ini menelaah teori serta studi-studi empiris yang relevan, termasuk penerapan di Indonesia. Hasil analisis menunjukkan bahwa efektivitas implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh struktur organisasi, kapasitas sumber daya, komunikasi antar aktor, dan dinamika politik lokal. Artikel ini menekankan perlunya pendekatan kontekstual dan partisipatif dalam implementasi kebijakan publik.

ABSTRACT

Policy implementation is a crucial phase in the public policy cycle, determining program success or failure. This article aims to analyse the implementation process using Charles O. Jones's framework, which includes three core components: organising, interpreting, and applying. Utilising a literature review method, this study examines theoretical insights and relevant empirical studies, particularly within the Indonesian context. The findings indicate that policy implementation effectiveness is significantly influenced by organisational structure, resource capacity, actor communication, and local political dynamics. The article underscores the importance of contextual and participatory approaches in public policy implementation.

*This is an open-access article under the [CC BY-NC](#) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by PT Metrum Karya
Mandiri.*



PENDAHULUAN

Kebijakan publik merupakan instrumen penting dalam upaya pemerintah merespons permasalahan yang dihadapi masyarakat. Kebijakan-kebijakan ini dirancang dengan tujuan untuk mencapai hasil tertentu, seperti meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mendorong pembangunan, atau menyelesaikan berbagai persoalan sosial.

Kebijakan publik memiliki kontribusi yang signifikan, baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, kebijakan publik membantu mengembangkan kerangka konseptual yang lebih sistematis untuk memahami proses kebijakan. Dengan memahami berbagai faktor yang memengaruhi proses tersebut, para aktor kebijakan dapat membangun model-model yang lebih akurat untuk memprediksi hasil suatu kebijakan.

Secara praktis, kebijakan publik menyediakan masukan berharga bagi para pembuat kebijakan dalam merancang dan melaksanakan kebijakan yang lebih efektif. Identifikasi terhadap hambatan-hambatan dalam implementasi memungkinkan penyusunan strategi yang tepat untuk mengatasinya. Selain itu, kebijakan publik juga berperan dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap proses pengambilan keputusan publik, serta mendorong partisipasi aktif dalam proses pengawasan dan evaluasi (Sabatier & Mazmanian, 1983).

Namun demikian, keberhasilan suatu kebijakan tidak semata-mata ditentukan oleh kualitas perumusan kebijakan, melainkan juga oleh bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat. Implementasi kebijakan merupakan proses kompleks yang tidak bersifat mekanis dan melibatkan berbagai faktor sosial, politik, dan institusional.

Tahapan implementasi kebijakan merupakan bagian krusial dalam siklus kebijakan publik karena menentukan keberhasilan atau kegagalan suatu program. Oleh karena itu, pemahaman terhadap faktor-faktor yang memengaruhi implementasi menjadi sangat penting. Salah satu tokoh penting yang memberikan kontribusi besar dalam studi implementasi kebijakan adalah Charles O. Jones.

Jones menekankan bahwa keberhasilan implementasi tidak dapat dilepaskan dari konteks politik dan administrasi. Ia berpendapat bahwa implementasi kebijakan bukan hanya sekadar menerapkan aturan, tetapi melibatkan dinamika hubungan antaraktor, termasuk pembuat kebijakan, birokrasi, dan masyarakat. Interaksi antaraktor ini menciptakan lingkungan yang kompleks dan sangat memengaruhi keputusan serta tindakan dalam pelaksanaan kebijakan (Jones, 1996).

Menurut Jones, proses kebijakan publik terdiri atas tiga tahap utama, yaitu formulasi kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Dalam pandangannya,

implementasi kebijakan harus mempertimbangkan adaptasi terhadap konteks lokal, kapasitas sumber daya manusia, dan alokasi sumber daya yang tersedia. Selain itu, faktor organisasi, komunikasi, koordinasi antaraktor, serta mekanisme pengawasan juga menjadi komponen penting yang tidak dapat diabaikan dalam proses implementasi (Jones, 1996).

Meskipun demikian, dalam praktiknya, implementasi kebijakan publik sering kali menghadapi berbagai kendala. Keterbatasan sumber daya, minimnya partisipasi pemangku kepentingan, serta lemahnya koordinasi antarlembaga menjadi tantangan utama. Perspektif Charles O. Jones menawarkan kerangka analitis yang komprehensif untuk memahami tantangan-tantangan tersebut dan sekaligus memberikan panduan strategis guna meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan.

Dengan demikian, kajian terhadap implementasi kebijakan publik melalui perspektif Charles O. Jones memberikan wawasan penting untuk memahami kompleksitas proses implementasi. Melalui pendekatan yang holistik, peneliti dan pembuat kebijakan dapat merancang serta melaksanakan kebijakan yang lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Selain itu, kajian ini juga diharapkan memberikan kontribusi teoretis maupun praktis bagi pengembangan studi kebijakan publik di masa mendatang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (*library research*), yang bertujuan untuk menggali dan menganalisis pemikiran Charles O. Jones dalam konteks implementasi kebijakan publik. Studi pustaka dipilih karena sesuai untuk menjawab pertanyaan konseptual dan teoritis mengenai bagaimana kebijakan publik diimplementasikan, serta untuk memahami relevansi kerangka Jones dalam menganalisis dinamika kebijakan di Indonesia. Pendekatan ini juga memungkinkan peneliti untuk membangun sintesis teori dari berbagai sumber ilmiah yang telah ada, baik berupa buku, artikel jurnal, laporan penelitian, maupun dokumen kebijakan yang relevan. Sebagaimana dijelaskan oleh Zed (2008), studi pustaka sangat penting dalam riset sosial-politik karena dapat memperluas pemahaman konseptual dan memperkaya kerangka analisis teoritis.

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari literatur sekunder yang diperoleh melalui penelusuran sistematis pada database akademik seperti Google Scholar, ResearchGate, dan repositori perguruan tinggi. Kriteria pemilihan literatur meliputi relevansi terhadap topik implementasi kebijakan, khususnya yang mengacu pada model Charles O. Jones, serta keterbaruan publikasi, dengan fokus utama pada sumber-sumber yang diterbitkan dalam rentang waktu sepuluh tahun terakhir. Selain itu, artikel-artikel yang

menyajikan studi kasus implementasi kebijakan di Indonesia juga diprioritaskan untuk dianalisis guna memberikan konteks empiris yang relevan terhadap teori yang dibahas.

Langkah-langkah analisis dilakukan secara tematik dengan menggunakan teknik *content analysis*, yaitu mengkategorikan temuan-temuan dari literatur ke dalam tiga komponen utama model Jones: pengorganisasian (*organizing*), penafsiran (*interpreting*), dan penerapan (*application*). Analisis dilakukan secara deduktif, di mana teori dijadikan kerangka awal untuk memahami fenomena implementasi yang muncul dalam literatur.

Selain itu, peneliti juga mengidentifikasi tantangan-tantangan implementasi kebijakan dalam konteks Indonesia dan mengaitkannya dengan kelemahan serta kekuatan pendekatan top-down yang melekat pada model Jones. Teknik analisis ini didasarkan pada panduan yang dikemukakan oleh Moleong (2013), yang menekankan pentingnya pemahaman makna melalui proses interpretasi terhadap data kualitatif secara mendalam dan sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Implementasi Kebijakan Menurut Charles O. Jones

Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu pendekatan klasik yang cukup berpengaruh dalam studi kebijakan publik (Jones, 1996). Dalam karyanya yang fundamental, *An Introduction to the Study of Public Policy*, Jones menjelaskan bahwa implementasi kebijakan adalah tahap krusial setelah penetapan kebijakan. Fokus utama dari tahap ini adalah bagaimana keputusan kebijakan tersebut dijalankan melalui serangkaian aktivitas dan program konkret guna mencapai tujuan yang telah digariskan sebelumnya. Jones mendefinisikan implementasi sebagai "serangkaian aktivitas yang diarahkan untuk menempatkan sebuah program agar menghasilkan dampak nyata" (Jones, 1996). Dengan kata lain, implementasi adalah proses mengubah keputusan kebijakan yang seringkali abstrak menjadi tindakan operasional di lapangan.

Menurut Jones, proses implementasi ini sangat kompleks dan dinamis karena melibatkan berbagai aktor, lembaga, serta dipengaruhi oleh kondisi sosial-politik yang beragam, yang kesemuanya dapat menentukan keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan (Bahagia, 2024). Oleh karena itu, implementasi bukan sekadar menjalankan perintah secara mekanis, melainkan sebuah proses yang memerlukan interpretasi dan adaptasi terhadap konteks spesifik di mana kebijakan tersebut diterapkan.

Jones mengemukakan bahwa: Implementasi merupakan suatu kegiatan yang dimaksudkan untuk mengoperasikan sebuah program, dalam mengoperasikan program ini

selanjutnya dikemukakan adanya 3 (tiga) kegiatan yang perlu dilakukan, yaitu: “*Organization* (pengorganisasian), *Interpretation* (penafsiran), dan *Application*” (penerapan) (Jones, 1996).

1. *Organizing* (Pengorganisasian)

Tahap pengorganisasian merujuk pada pembentukan atau penyesuaian struktur organisasi dan penentuan pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan. Ini bisa melibatkan lembaga birokrasi pemerintah maupun entitas non-pemerintah lainnya yang relevan. Lebih lanjut, pengorganisasian mencakup penataan ulang sumber daya, unit-unit kerja, serta metode agar program dapat berjalan efektif (Jones, 1996).

Aspek krusial dalam pengorganisasian meliputi ketersediaan sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia dengan keahlian yang sesuai, anggaran, maupun fasilitas yang diperlukan untuk menerjemahkan kebijakan menjadi tindakan nyata (Jones, 1996).

Struktur organisasi yang jelas dan terarah menjadi landasan penting bagi pelaksanaan program yang efektif. Penelitian mengenai implementasi kebijakan pengembangan Kota Layak Anak (KLA) menunjukkan bahwa aspek organisasi, termasuk pembentukan gugus tugas dan pembagian peran, menjadi fondasi awal dalam pelaksanaan kebijakan (Maisyaroh, 2015).

Demikian pula, studi implementasi kebijakan pengelolaan cagar budaya menekankan pentingnya struktur organisasi yang kompeten dan berkualitas. Dalam konteks ini, program pengelolaan cagar budaya harus memiliki struktur organisasi yang jelas dan teratur, serta didukung oleh koordinasi yang baik antar lembaga dan instansi terkait untuk mencapai tujuan pengelolaan yang optimal (Iwan Rasiwan, 2024).

2. *Interpreting* (Penafsiran)

Penafsiran adalah proses menerjemahkan bahasa kebijakan yang seringkali bersifat umum dan normatif ke dalam petunjuk teknis atau arahan operasional yang lebih konkret, sehingga dapat dipahami dan dijalankan oleh para pelaksana di tingkat lapangan. Kebijakan publik seringkali dirumuskan dalam bahasa yang luas, sehingga interpretasi yang tepat menjadi kunci agar kebijakan dapat diimplementasikan secara teknis dan konsisten. Para pelaksana harus mampu memahami tujuan dan sasaran kebijakan agar dapat menjalankan program sesuai dengan petunjuk teknis dan pelaksanaannya (Iwan Rasiwan, 2024).

Kemampuan untuk menerjemahkan program menjadi rencana dan arahan yang dapat diterima dan dilaksanakan adalah esensi dari tahap interpretasi ini (Matland, 1995). Dalam implementasi kebijakan tata kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), misalnya, pemahaman yang seragam mengenai undang-undang dan peraturan teknisnya oleh para pejabat PPID merupakan wujud dari interpretasi yang berhasil (Sjoraida, 2018).

Menerjemahkan isi kebijakan ke dalam petunjuk teknis atau operasional yang bisa dipahami dan dijalankan oleh para pelaksana di lapangan. Proses penerjemahan kebijakan dalam bentuk operasional, seperti peraturan teknis atau prosedur (Fadhil, 2024). Hal ini penting karena kebijakan publik sering kali bersifat umum dan perlu ditafsirkan agar dapat dijalankan secara teknis.

3. *Application* (Penerapan)

Penerapan merujuk pada pelaksanaan nyata dari kebijakan dalam bentuk program, pelayanan, atau regulasi yang konkret, sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Ini adalah fase di mana kebijakan dioperasionalkan secara rutin oleh aktor-aktor yang telah ditentukan dalam struktur organisasi.

Jones mendefinisikan penerapan sebagai berikut: penerapan mungkin dapat dipandang sebagai sebuah proses interaksi antara suatu perangkat tujuan dan tindakan yang mampu meraihnya. Penerapan program dengan demikian telah menjadi suatu jaringan yang tampak dampaknya. Penerapan adalah kemampuan untuk membentuk hubungan-hubungan lebih lanjut dalam rangkaian sebab akibat yang menghubungkan tindakan dengan tujuan (Jones, 1996).

Jones mengemukakan bahwa aplikasi pelaksanaan kebijakan publik merupakan suatu proses yang aktif dan selalu berubah, serta harus memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, dan objektivitas. Implementasi yang berhasil akan menghasilkan output dan outcomes seperti yang direncanakan (Maisyaroh, 2015).

Namun, dalam praktiknya, penerapan seringkali menghadapi berbagai kendala, seperti yang terlihat dalam implementasi kebijakan pengembangan Kota Layak Anak di mana kurangnya pembangunan infrastruktur menunjukkan penerapan yang belum optimal (Maisyaroh, 2015).

Selain itu, Charles O. Jones menyoroti sejumlah faktor utama yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, di antaranya:

1. **Struktur Organisasi:** Struktur organisasi yang jelas dan terarah sangat penting untuk pelaksanaan program yang efektif. Struktur yang jelas dan hirarkis dibutuhkan agar

kebijakan dapat dilaksanakan secara sistematis. Di Indonesia, struktur birokrasi yang bersifat sentralistik kerap menyulitkan fleksibilitas implementasi di tingkat lokal (Winarno, 2012).

2. Komunikasi: Komunikasi yang baik antara pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan sangat menentukan keberhasilan implementasi. Salah satu hambatan terbesar dalam implementasi kebijakan adalah lemahnya komunikasi vertikal dan horizontal. Ketika informasi dari pembuat kebijakan tidak tersampaikan dengan jelas kepada pelaksana, terjadi perbedaan tafsir yang mempengaruhi keberhasilan implementasi (Ripley & Franklin, 1986).
3. Sumber Daya: Ketersediaan sumber daya yang memadai, baik manusia maupun material, sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi kebijakan. Tanpa dukungan sumber daya manusia yang kompeten dan sumber daya finansial yang memadai, implementasi kebijakan hanya menjadi dokumen di atas kertas. Hal ini sering terjadi pada program-program bantuan sosial dan kebijakan pendidikan di daerah tertinggal (Purwanto & Sulistyastuti, 2012).

Analisis Implementasi dalam Praktik: Penerapan Model Charles O. Jones

Model Charles O. Jones telah banyak digunakan sebagai kerangka analisis dalam berbagai studi implementasi kebijakan. Misalnya, penelitian mengenai implementasi kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kabupaten Gorontalo Utara mengintegrasikan model Jones dengan model lain untuk menganalisis faktor-faktor organisasi, interpretasi, dan aplikasi (Sarfani Tabo, 2022). Studi lain tentang implementasi kebijakan pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) berbasis ekonomi kreatif juga menggunakan teori implementasi Jones untuk melihat aspek organisasi, interpretasi, dan aplikasi dalam upaya pengembangan tersebut (Wahyu Eka Satria, 2018). Hasil studi-studi ini menunjukkan bahwa ketiga aktivitas yang diidentifikasi Jones secara konsisten menjadi titik fokus dalam menilai efektivitas implementasi di berbagai sektor.

Namun, berbagai studi juga menunjukkan tantangan dalam penerapan ketiga aspek tersebut. Misalnya, dalam implementasi kebijakan pengelolaan cagar budaya di Kota Bandung, ditemukan bahwa aspek organisasi, interpretasi, dan aplikasi belum berjalan efektif (Iwan Rasiwan, 2024).

Demikian pula, dalam implementasi kebijakan penyederhanaan struktur organisasi di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, meskipun kebijakan telah diimplementasikan, kelompok

jabatan fungsional hasil penyetaraan masih memerlukan waktu untuk penyesuaian tugas dan fungsi baru (ResearchGate, 2024).

Kekuatan dan Keterbatasan Model Charles O. Jones

Sebagai sebuah kerangka kerja, model implementasi kebijakan Charles O. Jones memiliki beberapa kekuatan. *Pertama*, model ini menyediakan struktur yang jelas dan sistematis untuk menganalisis proses implementasi melalui tiga aktivitas inti (organisasi, interpretasi, aplikasi). Pendekatan ini membantu memetakan kompleksitas implementasi ke dalam komponen-komponen yang lebih mudah dikelola dan dianalisis. *Kedua*, model ini menekankan pentingnya aspek-aspek praktis dan manajerial dalam pelaksanaan kebijakan, seperti peran organisasi pelaksana dan penerjemahan kebijakan menjadi tindakan konkret.

Namun demikian, model Jones, yang sering dikategorikan sebagai pendekatan *top-down*, juga memiliki beberapa keterbatasan dan mendapatkan kritik. Beberapa kritik menyebutkan bahwa pendekatan *top-down* cenderung menyederhanakan masalah implementasi dan terlalu berfokus pada perspektif pembuat kebijakan, sehingga kurang memperhatikan peran dan pengaruh aktor-aktor lain di tingkat bawah, seperti birokrat garis depan (*street-level bureaucrats*) dan kelompok sasaran. Pendekatan ini juga terkadang dianggap kurang mampu mengakomodasi kompleksitas interaksi antar berbagai aktor dan variabel dalam lingkungan implementasi yang dinamis. Selain itu, kritik umum terhadap ilmu implementasi kebijakan adalah potensi ketidaklengkapan perspektif yang dapat berujung pada kebijakan yang kurang mencerminkan keunikan konteks lokal (Jones, 1996).

Posisi Model Jones dalam Studi Implementasi Kebijakan

Meskipun terdapat kritik, model Charles O. Jones tetap menjadi salah satu rujukan penting dalam studi implementasi kebijakan. Pemahamannya mengenai implementasi sebagai serangkaian aktivitas fungsional memberikan landasan yang berguna untuk analisis. Dalam perkembangannya, banyak studi yang mencoba mengkombinasikan atau melengkapi model Jones dengan pendekatan lain, seperti pendekatan *bottom-up* atau model-model sintesis, untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika implementasi kebijakan. Sebagai contoh, ada penelitian yang mengkolaborasikan model Jones dengan model Pentahelix untuk pengembangan ekonomi kreatif (Jones, 1996).

Dengan demikian, pembahasan mengenai implementasi kebijakan berdasarkan perspektif Charles O. Jones menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi tidak hanya bergantung pada kualitas perumusan kebijakan, tetapi juga pada efektivitas pengelolaan proses organisasi, kemampuan untuk menerjemahkan kebijakan secara tepat, dan

pelaksanaan program secara konsisten di lapangan, sambil terus memperhatikan berbagai faktor kontekstual yang melingkupinya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Implementasi kebijakan publik, sebagaimana dipaparkan oleh Charles O. Jones, merupakan proses kompleks yang tidak hanya melibatkan penerapan keputusan, tetapi juga penafsiran serta adaptasi terhadap konteks sosial, politik, dan administratif yang berkembang. Tiga komponen utama: *organizing*, *interpreting*, dan *application* menjadi kunci untuk memahami bagaimana kebijakan dapat dijalankan secara efektif.

Dalam konteks Indonesia, berbagai tantangan seperti lemahnya struktur organisasi, keterbatasan sumber daya, komunikasi yang tidak efektif, serta kepentingan politik kerap menghambat keberhasilan implementasi. Perspektif Charles O. Jones memberikan kerangka teoritis yang berguna untuk menganalisis dan mengevaluasi proses implementasi, serta mendorong perlunya pendekatan yang lebih fleksibel dan responsif terhadap dinamika lokal.

Oleh karena itu, implementasi kebijakan tidak dapat dipahami secara teknis semata, tetapi harus dilihat sebagai proses sosial-politik yang melibatkan banyak aktor dan pengaruh eksternal.

Saran

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dalam implementasi kebijakan publik agar dapat berjalan secara optimal. Pemerintah perlu memperkuat struktur organisasi pelaksana kebijakan dengan cara menyusun pembagian tanggung jawab yang jelas antar tingkat pemerintahan, baik pusat maupun daerah. Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia juga menjadi hal yang mendesak, khususnya melalui program pelatihan yang berkelanjutan dan penyediaan sumber daya finansial maupun teknis yang memadai untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Sistem komunikasi antara pembuat kebijakan dan pelaksana harus dirancang secara efektif, terbuka, dan dua arah agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menafsirkan kebijakan yang telah dirumuskan. Dalam konteks desentralisasi, pelibatan aktor lokal dan masyarakat perlu ditingkatkan sebagai bagian dari proses implementasi, sehingga kebijakan yang dijalankan lebih sesuai dengan kondisi riil di lapangan dan mendapatkan legitimasi sosial. Terakhir, pelaksanaan evaluasi secara berkala perlu diperkuat, dengan melibatkan para pelaksana dan penerima manfaat kebijakan. Evaluasi ini diharapkan tidak

hanya menjadi alat penilaian, tetapi juga menjadi sumber umpan balik yang konstruktif bagi penyempurnaan kebijakan di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Bahagia., Faraidiany, M., Muliawati. (2024). Hubungan Kepemimpinan Camat Terhadap Kinerja Pegawai pada Kantor Camat Ulee Kareng Kota Banda Aceh. *Jurnal Metrum*, 2(1), 14-31.
- Fadhil, Bahagia. (2024). Implementasi Kebijakan Dana Desa Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 (Studi Pada Gampong Kapa Kec. Langsa Timur Kota Langsa. *Jurnal Metrum*, 2(2)
- Jones, C. O. (1996). *An Introduction to the Study of Public Policy*. Nelson-Hall
- Maisyaroh (2015). Implementasi Kebijakan Pengembangan Kota Layak Anak Di Kelurahan Batulayang Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak [Online]. Diakses dari: https://jurnafis.untan.ac.id/index.php/publika/article/viewFile/887/pdf_132
- Matland, Richard E. (1995). *Synthesizing the Implementation Literature: The Ambiguity-Conflict Model of Policy Implementation*. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 5(2), 145-174
- Moleong, L. J. (2013). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Purwanto, E. A., & Sulistyastuti, D. R. (2012). *Implementasi kebijakan publik: Konsep dan aplikasinya di Indonesia*. Gava Media.
- Rasiwan, Iwan. (2024). Implementasi Kebijakan Penelolaan Cagar Budaya Di Kota Bandung [Online]. Diakses dari: <https://journal.awatarapublisher.com/index.php/manifesto/article/download/115/152/1321>
- Ripley, R. B., & Franklin, G. A. (1986). *Policy implementation and bureaucracy*. The Dorsey Press.
- Sabatier, P. A., & Mazmanian, D. (1983). *Implementation and public policy*. Scott, Foresman.
- Sjoraida, Diah Fatma. (2018). Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat [Online]. Diakses dari: <https://jurnal.unpad.ac.id/sosiohumaniora/article/view/8338>
- Tabo, Sarfan dkk, (2022). Implementasi Program Jaminan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Di Puskesmas Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara [Online]. Diakses dari: <https://ejournal.iaingorontalo.ac.id/index.php/jaspol/article/view/547>
- Wahyu Eka Satria P. (2018). Implementasi Program Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Berbasis Ekonomi Kreatif (Studi pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan

Perdagangan Kota Batu) [Online]. Diakses dari:
<https://repository.ub.ac.id/id/eprint/162581/1/Wahyu%20Eka%20Satria%20P.pdf>

Winarno, B. (2012). *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS.

Zed, M. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.